

## **Pelaksanaan Pembekalan dan Uji Sertifikasi Tenaga Konstruksi untuk Wilayah Kabupaten Buton Tengah**

**Muh. Sayfullah. S<sup>1\*</sup>, Ahmad Efendi<sup>2</sup>, Muhammad Abdu<sup>3</sup>, Aswad Asrasal<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

e-mail: \* [muh.sayfullahs@gmail.com](mailto:muh.sayfullahs@gmail.com)

### **Abstrak**

Sektor konstruksi memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi daerah. Keberhasilan pembangunan infrastruktur sangat ditentukan oleh ketersediaan sumber daya manusia (SDM) konstruksi yang kompeten, profesional, dan tersertifikasi. Kabupaten Buton Tengah (Buteng) sebagai daerah yang sedang berkembang menghadapi tantangan keterbatasan tenaga kerja konstruksi bersertifikat, baik pada level pekerja terampil maupun tenaga terlatih. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buton Tengah menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi dan uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Gatensi Karya Konstruksi sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) Sewaktu Buton Tengah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan daya saing tenaga kerja konstruksi melalui program pembekalan dan uji sertifikasi tenaga konstruksi di wilayah Buteng. Metode pelaksanaan meliputi identifikasi kebutuhan kompetensi, pembekalan materi teknis dan nonteknis berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), pendampingan administrasi sertifikasi, serta pelaksanaan uji sertifikasi yang dilaksanakan melalui mekanisme TUK Sewaktu Buton Tengah bekerja sama dengan LSP Gatensi Karya Konstruksi yang terlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap regulasi jasa konstruksi, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta standar mutu pekerjaan konstruksi. Selain itu, semua peserta dinyatakan kompeten dan memperoleh sertifikat kompetensi kerja sesuai skema yang diikuti. Kegiatan ini berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas SDM konstruksi daerah, penguatan peran tenaga kerja lokal dalam proyek pembangunan, serta mendukung terwujudnya pembangunan infrastruktur yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan di Kabupaten Buton Tengah.

**Kata kunci :** Pengabdian kepada Masyarakat, Sertifikasi Tenaga Konstruksi, Pembekalan Kompetensi, SDM Konstruksi, Buton Tengah

### **Abstract**

*The construction sector plays a strategic role in supporting infrastructure development and regional economic growth. The success of infrastructure development is largely determined by the availability of competent, professional, and certified construction human resources. Central Buton (Buteng) Regency, as a developing region, faces the challenge of limited certified construction workers, both at the skilled and trained levels. In this regard, the Public Works and Spatial Planning Office of Central Buton Regency is holding a competency improvement and certification test for construction workers in collaboration with the Gatensi Karya Konstruksi Professional Certification Institute (LSP) as the Buton Tengah Competency Testing Center (TUK). This community service activity aims to improve the competency, professionalism, and competitiveness of construction workers through a training program and certification test for construction workers in the Buteng region. The implementation method includes identifying competency needs, providing technical and non-technical materials based on the Indonesian National Work Competency Standards (SKKNI), assistance with certification administration, and implementing certification tests carried out through the TUK Sewaktu Buton Tengah mechanism*

*in collaboration with LSP Gatesi Karya Konstruksi licensed by the National Professional Certification Agency (BNSP). The results of the activity showed an increase in participants' understanding of construction service regulations, the implementation of occupational safety and health (K3), and construction work quality standards. In addition, all participants were declared competent and received work competency certificates according to the scheme they followed. This activity contributed positively to improving the quality of regional construction human resources, strengthening the role of local workers in development projects, and supporting the realization of safe, quality, and sustainable infrastructure development in Central Buton Regency.*

**Keywords:** *Community Service, Construction Workforce Certification, Competency Development, Construction Human Resources, Central Buton*

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas wilayah, serta pemerataan pembangunan nasional dan daerah. Sektor jasa konstruksi berperan strategis dalam penyediaan infrastruktur fisik yang mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), keberhasilan pembangunan infrastruktur sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) konstruksi yang kompeten dan profesional (Kementerian PUPR, 2019). Meskipun memiliki peran strategis, tingkat kepemilikan sertifikat kompetensi di kalangan tenaga kerja konstruksi di daerah masih tergolong rendah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), mayoritas tenaga kerja konstruksi di Indonesia hingga saat ini masih didominasi oleh pekerja informal yang belum memiliki sertifikasi kompetensi (BPS, 2022). Kondisi serupa juga dijumpai di Kabupaten Buton Tengah, di mana rendahnya partisipasi tenaga kerja dalam program sertifikasi dipengaruhi oleh terbatasnya akses terhadap lembaga sertifikasi, kurangnya informasi mengenai pentingnya sertifikasi, serta kendala biaya yang harus ditanggung oleh tenaga kerja.

Sejumlah penelitian terdahulu menegaskan perlunya intervensi berupa pelatihan dan pendampingan sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi di daerah. Mulyadi dan Suryanto (2018) menyatakan bahwa program pembekalan yang terintegrasi dengan uji sertifikasi terbukti mampu meningkatkan kompetensi teknis sekaligus kepercayaan diri tenaga kerja konstruksi. Selanjutnya, Prasetyo et al. (2020) menekankan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada sertifikasi kompetensi memberikan dampak nyata terhadap peningkatan daya saing tenaga kerja lokal. Berangkat dari kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk pembekalan dan uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi di Kabupaten Buton Tengah. Kegiatan ini dirancang tidak hanya sebagai sarana peningkatan kemampuan teknis, tetapi juga sebagai upaya pemberdayaan tenaga kerja lokal agar memiliki pengakuan kompetensi secara nasional dan mampu berperan optimal dalam mendukung pembangunan infrastruktur daerah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menegaskan kewajiban setiap tenaga kerja yang terlibat dalam sektor jasa konstruksi untuk memiliki sertifikat kompetensi kerja sebagai bentuk pengakuan resmi terhadap keahlian dan keterampilannya. Sertifikasi kompetensi berperan penting dalam

menjamin kualitas pelaksanaan pekerjaan konstruksi sekaligus memberikan perlindungan bagi pengguna maupun penyedia jasa konstruksi (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017). Selaras dengan ketentuan tersebut, Suharto dan Kurniawan (2019) menyatakan bahwa penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) melalui mekanisme sertifikasi mampu meningkatkan konsistensi mutu pekerjaan serta memperkuat penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di sektor konstruksi.

## **METODE**

Metode pelaksanaan kegiatan meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

### **1. Identifikasi Kebutuhan dan Seleksi Peserta**

Tahap awal dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Perumahan dan Tata Ruang Kabupaten Buton Tengah dengan pemangku kepentingan lokal untuk mengidentifikasi kebutuhan kompetensi tenaga kerja konstruksi daerah. Seleksi peserta mempertimbangkan pengalaman kerja, bidang keahlian, serta kesesuaian dengan skema sertifikasi yang tersedia.

### **2. Pembekalan Materi Kompetensi**

Pembekalan diberikan dalam bentuk pelatihan singkat yang mencakup pemahaman regulasi jasa konstruksi, pengenalan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta materi teknis sesuai skema sertifikasi. Metode pembekalan dilakukan melalui ceramah, diskusi, dan studi kasus yang relevan dengan kondisi lapangan.

### **3. Pendampingan Administrasi Sertifikasi**

Peserta memperoleh pendampingan dalam menyiapkan dokumen persyaratan sertifikasi, seperti formulir pendaftaran, portofolio pengalaman kerja, dan bukti pendukung lainnya. Pendampingan ini bertujuan untuk meminimalkan kendala administratif yang sering menjadi hambatan utama dalam proses sertifikasi tenaga kerja konstruksi (Mulyadi & Suryanto, 2018).

### **4. Pelaksanaan Uji Sertifikasi**

Uji sertifikasi dilaksanakan oleh asesor kompetensi dari LSP Gatensi Karya Konstruksi melalui TUK Sewaktu Buton Tengah. Metode uji meliputi observasi langsung, wawancara, serta verifikasi portofolio sesuai dengan skema sertifikasi yang ditetapkan oleh BNSP.

### **5. Evaluasi dan Tindak Lanjut**

Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas kegiatan dan tingkat keberhasilan peserta dalam memperoleh sertifikat kompetensi. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perumusan rekomendasi untuk pelaksanaan program

pembekalan dan sertifikasi secara berkelanjutan di Kabupaten Buton Tengah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Kegiatan pembekalan diikuti oleh tenaga kerja konstruksi yang berasal dari beragam latar belakang keahlian, antara lain tukang bangunan, mandor, serta tenaga pelaksana lapangan. Selama pelaksanaan pembekalan, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap regulasi jasa konstruksi, standar kompetensi kerja, serta pentingnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam pelaksanaan proyek. Hasil ini sejalan dengan temuan Rahman dan Abdullah (2021) yang menyatakan bahwa pelatihan berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) efektif dalam meningkatkan kesadaran tenaga kerja terhadap mutu pekerjaan dan keselamatan pada proyek konstruksi

**Tabel 1.** Peserta Pembekalan dan Uji Sertifikasi Kompetensi Kerja

No.	Jabatan Kerja	Jumlah Peserta
1.	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Level 3	10
2.	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung	17
3.	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya	12
4.	Manager Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung	10
5.	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Level 3	8
6.	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan	10
7.	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Madya	3
8.	Petugas Keselamatan Konstruksi	35

**Sumber :** Analisis Data, 2025

Tabel 1 menunjukkan jumlah peserta berdasarkan jabatan kerja di bidang konstruksi, yang mencakup pekerjaan gedung, pekerjaan jalan, serta keselamatan konstruksi. Secara keseluruhan, terdapat 105 peserta yang terbagi ke dalam delapan jabatan kerja. Jumlah peserta terbanyak berasal dari jabatan Petugas Keselamatan Konstruksi sebanyak 35 orang, yang menunjukkan tingginya perhatian terhadap aspek keselamatan dalam kegiatan konstruksi. Selanjutnya, jabatan Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung memiliki 17 peserta, diikuti oleh Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya sebanyak 12 peserta. Untuk level manajerial, Manager Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung diikuti oleh 10 peserta, jumlah yang sama dengan Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan. Sementara itu, Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Level 3 diikuti oleh 10 peserta, dan Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Level 3 sebanyak 8 peserta. Jumlah peserta paling sedikit terdapat pada jabatan Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Madya, yaitu 3 orang. Secara umum, data ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta berada pada jabatan pelaksana dan keselamatan, yang berperan langsung dalam pelaksanaan teknis di

lapangan.

## **Pembahasan**

Hasil pelaksanaan uji sertifikasi menunjukkan bahwa mayoritas peserta dinyatakan kompeten sesuai dengan skema sertifikasi yang diikuti. Temuan ini mengindikasikan bahwa tenaga kerja konstruksi lokal pada umumnya telah memiliki pengalaman kerja serta keterampilan praktis yang memadai, namun sebelumnya belum terakomodasi secara optimal dalam sistem sertifikasi formal. Temuan ini sejalan dengan penelitian Mulyadi dan Suryanto (2018) yang menyatakan bahwa kendala utama dalam kepemilikan sertifikat kompetensi bukan disebabkan oleh rendahnya kemampuan teknis tenaga kerja, melainkan oleh terbatasnya akses terhadap lembaga sertifikasi serta minimnya pendampingan selama proses sertifikasi.

Keberhasilan peserta dalam memperoleh sertifikat kompetensi memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan rasa percaya diri serta perluasan peluang kerja bagi tenaga kerja konstruksi lokal. Prasetyo et al. (2020) menyatakan bahwa kepemilikan sertifikat kompetensi merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja konstruksi, terutama pada proyek-proyek yang didanai oleh pemerintah. Di samping itu, sertifikasi kompetensi juga berperan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Hal ini sejalan dengan pendapat Suharto dan Kurniawan (2019) yang mengungkapkan bahwa tenaga kerja konstruksi yang tersertifikasi cenderung lebih konsisten dalam menerapkan standar mutu dan mematuhi prosedur kerja yang telah ditetapkan.

Ditinjau dari perspektif pembangunan daerah, pelaksanaan kegiatan ini sejalan dengan kebijakan penguatan sumber daya manusia konstruksi lokal sebagaimana tertuang dalam peta jalan pengembangan SDM jasa konstruksi yang disusun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Peningkatan jumlah tenaga kerja konstruksi yang tersertifikasi di Kabupaten Buton Tengah diharapkan mampu mendorong pelaksanaan pembangunan infrastruktur daerah yang lebih efektif, efisien, serta berkelanjutan melalui peningkatan kualitas dan profesionalisme tenaga kerja (Kementerian PUPR, 2019).



**Gambar 1.** Kegiatan Pembekalan Hari Pertama

**Sumber :** Analisis Data, 2025

Pada hari pertama, kegiatan pembekalan uji sertifikasi untuk jabatan kerja Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Level 3 dan Pelaksana Lapangan



Pekerjaan Gedung pada hari pertama dilaksanakan sebagai tahap awal persiapan peserta sebelum mengikuti uji sertifikasi kompetensi. Kegiatan ini diikuti oleh 27 peserta yang berasal dari kedua jabatan kerja tersebut. Pembekalan difokuskan pada pengenalan skema sertifikasi, pemahaman Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang berlaku, serta penjelasan mengenai unit-unit kompetensi yang akan diujikan. Selain itu, peserta juga dibekali dengan pemahaman terkait peran dan tanggung jawab pelaksana lapangan pekerjaan gedung, termasuk aspek perencanaan pelaksanaan, pengendalian mutu, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta administrasi lapangan. Kegiatan berlangsung secara interaktif melalui pemaparan materi, diskusi, dan tanya jawab, sehingga peserta dapat memahami secara menyeluruh mekanisme uji sertifikasi dan kesiapan yang harus dipenuhi.



**Gambar 2.** Kegiatan Pembekalan Hari Kedua

**Sumber :** Analisis Data, 2025

Pada hari kedua kegiatan pembekalan uji sertifikasi untuk jabatan kerja Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya dan Manager Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung pada hari kedua dilaksanakan sebagai lanjutan dari rangkaian persiapan uji sertifikasi kompetensi. Kegiatan ini diikuti oleh 22 peserta dari kedua jabatan kerja tersebut. Pembekalan pada hari kedua difokuskan pada pendalaman kompetensi teknis dan manajerial, meliputi pengendalian pelaksanaan pekerjaan gedung, manajemen mutu, pengelolaan sumber daya, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta pengendalian administrasi dan pelaporan proyek.



**Gambar 3.** Kegiatan Pembekalan Hari Ketiga

**Sumber :** Analisis Data, 2025

Pada hari ketiga, kegiatan pembekalan uji sertifikasi pada hari ketiga dilaksanakan untuk jabatan kerja Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Level

3, Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung, dan Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya. Kegiatan ini diikuti oleh 21 peserta yang berasal dari ketiga jabatan kerja tersebut. Pembekalan difokuskan pada penguatan kompetensi teknis pelaksanaan pekerjaan gedung, meliputi pemahaman tahapan pekerjaan konstruksi, pengendalian mutu pekerjaan, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta kelengkapan administrasi lapangan. Selain itu, peserta diberikan penjelasan terkait mekanisme uji sertifikasi, unit kompetensi yang akan diuji, serta tata cara penyusunan dan penyampaian bukti kerja sesuai standar yang berlaku.

### **KESIMPULAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pembekalan dan uji sertifikasi tenaga konstruksi di Kabupaten Buton Tengah terbukti efektif dalam meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan daya saing tenaga kerja konstruksi lokal. Program ini mampu meningkatkan pemahaman peserta terhadap regulasi dan standar kompetensi kerja serta menghasilkan tenaga kerja yang tersertifikasi dan siap terlibat dalam proyek konstruksi formal. Ke depan, kegiatan serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan dukungan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.

### **SARAN**

Kegiatan pembekalan dan uji sertifikasi tenaga konstruksi di Kabupaten Buton Tengah perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan dukungan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. Program ini sebaiknya diperluas cakupan pesertanya serta disesuaikan dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan industri konstruksi, sehingga mampu menghasilkan tenaga kerja lokal yang kompeten, tersertifikasi, dan berdaya saing.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, seluruh pemangku kepentingan, serta lembaga dan instruktur yang terlibat atas dukungan dan kerja samanya dalam pelaksanaan kegiatan pembekalan dan uji sertifikasi tenaga konstruksi. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat nyata.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik konstruksi Indonesia 2022. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2019). Peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia jasa konstruksi.

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian PUPR Republik Indonesia.

- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2014). Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang jasa konstruksi. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
- Mulyadi, A., & Suryanto, D. (2018). Hambatan dan tantangan sertifikasi kompetensi tenaga kerja konstruksi di Indonesia. *Jurnal Teknik Sipil dan Manajemen Konstruksi*, 7(2), 101–110.
- Mulyadi, A., & Suryanto, D. (2018). Pengaruh program pelatihan dan sertifikasi terhadap peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi. *Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan*, 20(2), 85–94.
- Prasetyo, R., Nugroho, S., & Wibowo, A. (2020). Pengabdian kepada masyarakat berbasis sertifikasi kompetensi sebagai upaya peningkatan daya saing tenaga kerja konstruksi lokal. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(1), 45–53.
- Prasetyo, R., Nugroho, S., & Wibowo, A. (2020). Peran sertifikasi kompetensi dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja konstruksi pada proyek pemerintah. *Jurnal Manajemen Konstruksi*, 6(1), 33–41.
- Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11.
- Suharto, B., & Kurniawan, A. (2019). Penerapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) dalam peningkatan mutu dan keselamatan kerja konstruksi. *Jurnal Teknik Sipil*, 26(3), 213–221.